

Rekayasa Terbatas Lalu Lintas di Pasar Kebon Kembang

BOGOR (IM)- Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Bogor menerapkan rekayasa terbatas arus lalu lintas dari dan menuju Pasar Kebon Kembang atau Pasar Anyar, Bogor Tengah. Rekayasa lalu lintas ini untuk mengantisipasi kesemrawutan akibat tingginya trafik kunjungan warga ke pasar menjelang Idul Fitri.

“Pasar Kebon Kembang ini setiap menjelang Lebaran selalu mendapat atensi khusus dari kami. Tetapi untuk tahun ini atensinya bukan saja soal kesemrawutan dan kebersihan, lebih dalam lagi terkait upaya kami mencegah naiknya kasus lonjakan Covid-19. Kota Bogor kemarin mencatatkan angka terendah sepanjang masa pandemi, satu hari kasusnya hanya 13, relatif terkendali. Namun, secara nasional ada indikasi Covid-19 naik,” ungkap Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor, Bima Arya dalam keterangan tertulis pada Rabu (5/5).

Bima melanjutkan, jadi kalau semua orang lalai, abai dan lengah, maka akan naik Covid-19 ini. Naik ini karena apa?, karena kerumunan warga, mobilitas warga.

Oleh karena itu, Bima mengatakan, Satgas Covid-19 Kota Bogor sedang fokus untuk

mencegah dan mengantisipasi adanya kerumunan warga di pusat perbelanjaan. Salah satunya di Pasar Kebon Kembang.

Adapun, upaya tersebut mulai dari rekayasa lalu lintas, pengaturan parkir hingga akses keluar masuk. Hal tersebut untuk mencegah kerumunan atau penumpukan pengunjung pasar. “Seperti saya pernah sampaikan kalau kemudian pasar penuh mal penuh sangat mungkin kita lakukan untuk tutup sementara termasuk di lingkungan ini. Jangan sampai ada penumpukan kendaraan, kemacetan, kesemrawutan, sehingga kemudian terjadi kerumunan orang di sini,” tegas Bima.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Susatyo Purnomo Condoro menambahkan, ada beberapa poin rekomendasi dan pendindakan yang akan dilakukan petugas jika terjadi penumpukan pengunjung di Pasar Kebon Kembang. Termasuk pembuatan check point pengawas protokol kesehatan.

“Yang pertama, maka untuk akses untuk menuju ke Pasar Kebon Kembang ini hanya ada dua arus, yaitu dari Jalan Dewi Sartika dan Jalan Sawojajar. Untuk keluar itu hanya satu nanti kita akan lewatkan ke Jalan Pengadilan,” ucap Susatyo. ● **gio**

Entaskan Buta Al Quran, Program Bogor Mengaji Diluncurkan

BOGOR (IM)- Dalam upaya mengentaskan buta baca Al Quran, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan meluncurkan program Bogor Mengaji yang digelar serentak di 68 kelurahan. Sasaran utama dari program itu adalah 2.000 orang pralansia se-Kota Bogor.

Kabag Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bogor, Asep Kartiwa mengatakan, untuk sementara program tersebut masih bersifat swadaya. Sehingga tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). “Insya Allah untuk program awal rencananya di-launching di Masjid Al Mujahidin, Kelurahan Mekarwangi, Tanah Sareal,” tutur Asep di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/5).

Asep menjelaskan, alasan pralansia menjadi sasaran program Bogor Mengaji, karena untuk anak-anak masih ditemukan banyak tempat mengaji. Sehingga, dengan adanya program itu, warga pralansia di Kota Bogor bisa lebih semangat dalam mem-

baca dan mempelajari Al Quran. Dia menuturkan, program Bogor Mengaji merupakan gerakan masyarakat yang diinisiatif mulai dari jajaran pimpinan Pemkot Bogor. Termasuk warga yang berupaya ingin mengentaskan buta baca Al Quran. “Kalau ada yang ingin berinfak dan shodaqoh membantu program Bogor Mengaji bisa melalui Baznas Kota Bogor. Baznas memiliki rekening sendiri untuk program ini,” katanya.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, Bogor Mengaji bakal diluncurkan bersamaan dengan pemberian insentif guru ngaji. Nantinya, ada 2.800 guru ngaji yang akan diberikan kartu Bogor Mengaji.

“Di kartu ini ada insentif dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, jadi satu paket dalam bentuk kartu. Ada peningkatan jumlah insentif, tahun lalu Rp 100 ribu per bulan, tahun ini Rp 150 ribu per bulan yang akan diberikan selama setahun,” ucap Bima. ● **gio**



BAZAR RAMADHAN PRODUK UMKM

Pelaku bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menata produknya dalam Bazar Ramadan produk UMKM Kabupaten Bogor di Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/5). Bazar Ramadan produk UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor bertujuan untuk menstimulasi daya beli masyarakat jelang Idul Fitri 1442 H.

Ridwan Kamil: Aglomerasi Pergerakan Masih Boleh, tapi Tidak Mudik

BANDUNG (IM)- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sepakat dengan larangan mudik lokal yang diutarakan oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo. Hanya saja, mobilitas di wilayah aglomerasi masih diperbolehkan.

Ia menyadari bahwa isu mengenai larangan mudik ini menimbulkan perdebatan. Namun, Gubernur Jabar menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap konsisten satu narasi dengan pemerintah pusat untuk menghindari lonjakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi di India.

Pria yang akrab disapa Emil mengingatkan bahwa setiap orang memiliki potensi membawa virus yang bisa meningkatkan tingkat keterpaparan kepada orang tua yang usianya sudah sepuh, atau kepada orang yang belum mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Dibutuhkan saling pengertian dari semua pihak. Masyarakat jangan egois atau melihat situasi saat ini dengan logika zaman sebelum pandemi. Jangan sampai kejadian tahun lalu berulang di mana lonjakan kasus

meningkat 90 persen karena abai dengan isu pandemi Covid-19.

“Kalau saya sependapat dengan Pak Doni Monardo, bahwa aglomerasi pergerakan masih boleh, tapi tidak mudik, kira-kira begitu,” kata dia, Rabu (5/5). “Karena sama saja, mau lokal tidak lokal yang namanya mudik ada orang yang biasa merantau bertemu dengan orang tuanya walaupun jaraknya mungkin tidak 150 kilometer mungkin hanya 30 Kilometer. Sama saja. Jadi saya sependapat dengan Pak Doni Monardo tidak ada mudik lokal, tapi pergerakan di aglomerasi masih dibolehkan,” katanya melanjutkan.

Disinggung mengenai soal mutasi virus covid-19 dari luar negeri, Ridwan Kamil menyatakan bahwa solusi penanganannya masih sama, pencegahannya pun masih efektif dengan protokol kesehatan yang sudah berjalan. “Saya kira solusi medisnya sama. Virus sebelum ada dari luar negeri, mutasinya saja sudah empat. Artinya dia menyebar lebih luas. Oleh karena itu solusi 3M dan lebih disiplin saja,” pungkaskanya. ● **pur**

PENGUMUMAN HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI PT. ASCENT TATTVA RESOURCES (dalam likuidasi)

Dengan ini diumumkan bahwa proses likuidasi PT. ASCENT TATTVA RESOURCES (dalam likuidasi) (“Perseroan”) telah selesai berdasarkan keputusan RUPS. RUPS telah menerima laporan pertanggungjawaban Likuidator dan membebaskan Likuidator terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam proses likuidasi. Sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan.

Jakarta, 06 Mei 2021

Likuidator PT. ASCENT TATTVA RESOURCES (dalam likuidasi)

8 | Nusantara



IST

Kedua bendungan ini memiliki fungsi sebagai penahan air ketika terjadi luapan air sungai. Bendungan itu akan menahan dan menampung air sekitar 20% sehingga air tidak turun semua ke Jakarta. Diharapkan pembangunannya cepat selesai.

BISA MENGURANGI 12% POTENSI BANJIR DI JAKARTA

Luhut dan Ade Yasin Berharap Pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi Cepat Selesai

Kedua bendungan tersebut dapat menampung lebih dari 6 juta kubik air. Selain itu air dapat dikontrol sehingga tidak langsung tumpah ke Jakarta. Daya tampung air di Jakarta hanya 2.000 debit air sedangkan ketika banjir, ada 3.000 debit air yang masuk Jakarta. Ini artinya ada 1.000 debit air yang jadi permasalahan dan harus segera diatasi.

BOGOR (IM)- Bupati Bogor, Ade Yasin bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan, meninjau dua lokasi Bendungan Ciawi dan Bendungan

Sukamahi Megamendung Kabupaten Bogor, Rabu (5/5).

Keduanya melihat langsung progres pembangunan dua bendungan itu, mengingat bendungan itu akan dipercepat pembangunannya karena dapat

mengurangi dan mengendalikan masalah banjir di Jakarta hingga 12 persen.

Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan, kedua bendungan itu memiliki fungsi sebagai penahan air ketika terjadi luapan air sungai. Bendungan itu akan menahan dan menampung air sekitar 20% sehingga air tidak turun semua ke Jakarta.

“Kami sangat mendukung pembangunan dua bendungan ini, karena untuk kebaikan kita semua, kebetulan Kabupaten Bogor berada di hulu, banyak aliran dan sumber air yang mengalir ke Jakarta. Harus didukung karena bendungan ini sebagai upaya pengendalian banjir, kita berharap agar pembangunannya cepat selesai, mudah-mudahan

Juni mendatang sudah rampung,” ujar Bupati.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan dua bendungan tersebut dapat menampung lebih dari 6 juta kubik air. Selain dapat menampung air, juga air dapat dikontrol sehingga air tidak langsung tumpah ke Jakarta. Daya tampung air di Jakarta hanya 2.000 debit air sedangkan ketika banjir ada 3.000 debit air yang masuk ke Jakarta. Ini artinya ada 1.000 debit air yang jadi permasalahan dan harus segera diatasi.

“Kalau dua bendungan ini sudah jadi, akan mengurangi 12% potensi banjir di Jakarta,

tadi saya lihat untuk sodetan sudah setengah selesai mudah-mudahan sore ini bisa selesai,” kata Luhut.

Menurutnya, kerjasama antara Pemkab Bogor, Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat dalam hal pengendalian banjir melalui pembangunan dua bendungan itu sudah paten, dan menjadi contoh karena koordinasinya sangat bagus.

“Kita berharap Juli mendatang dua bendungan itu bisa selesai. Pekerjaan ini sangat masif yang dapat mengurangi banjir di Jakarta. Kita juga akan bekerjasama dengan Kodam untuk mendisiplinkan masyarakat karena manfaat bendungan ini sangat baik,” tutupnya. ● **gio**

Pemudik Nekat Bakal Diisolasi di Tempat Angker

MEGAMENDUNG (IM)- Tidak hanya bagi para pemudik atau wisatawan yang reaktif atau positif terpapar wabah virus korona (Covid 19), Gedung Pusat Isolasi Covid-19 Cibogo, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Megamendung, Kabupaten Bogor yang terbilang angker juga diperuntukkan bagi pemudik yang harus isolasi mandiri menunggu hasil swab test atau

rapid test antigen.

“Gedung Pusat Isolasi Covid 19 Cibogo, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung yang terbilang angker ini bukan hanya diperuntukkan bagi para pemudik atau wisatawan yang reaktif atau positif terpapar Covid 19 saja, tapi juga bagi pemudik yang nekat melanggar aturan larangan mudik,” kata Bupati Bogor, Ade Yasin kepada wartawan, Rabu, (5/5).

Wanita yang merupakan penyintas Covid 19 ini meminta para calon pemudik untuk bersabar dan tidak melakukan mudik, demi kesehatan dan keselamatan orang tua maupun keluarga besar di kampung halaman.

“Saya mengimbau kepada masyarakat yang ingin mudik ke Kabupaten Bogor untuk mengurangi niatnya, kalau tetap nekat, ada laporan dari pemerintah desa dan pemerintah

kecamatan maka akan diisolasi di sini. Di Gedung Pusat Isolasi Covid 19 Cibogo, Desa Cipayung Girang ini sudah kami sediakan untuk 80 orang pelanggran aturan Pemberlakuan Pembatasan Kesehatan Masyarakat (PPKM),” sambungnya.

Ade menuturkan selain Gedung Pusat Isolasi Covid 19 Cibogo, Desa Cipayung Girang, Gedung Pusat Isolasi Covid 19 lainnya di Kecamatan Kemang

juga disediakan bagi pemudik dan wisatawan yang reaktif atau positif terpapar Covid 19.

“Bagi pemudik dan wisatawan yang reaktif atau positif terpapar Covid 19, termasuk orang tanpa gejala atau gejala ringan bisa juga kami isolasi atau rawat di Gedung Pusat Isolasi Covid 19 lainnya di Kecamatan Kemang,” tutur Ade. ● **gio**

Ade Yasin Putar Balik Pemudik yang Hendak Masuk Kab. Bogor

CIBINONG (IM)- Pemudik asal Derah Istimewa Yogyakarta, Kota Medan dan DKI Yogyakarta diputar balik oleh Bupati Bogor, Ade Yasin di Pos Pengamanan Operasi Ketupat Lodaya di Kecamatan Cigombong maupun Gadog, Kecamatan Megamendung.

Hal itu selain dikarenakan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro juga dikarenakan adanya aturan dari pemerintah pusat atau tepatnya Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H.

“Kami tadi sudah memutarbalikkan pemudik asal Derah Istimewa Yogyakarta, Kota Medan dan DKI Yogyakarta. Tujuan mereka ingin mudik ke Kabupaten Bogor,” ujar Bupati Bogor, Ade Yasin kepada wartawan, Rabu, (5/5).

Politisi PPP ini menerangkan penekatan terhadap para pemudik dan wisatawan di titik-titik perbatasan dan objek wisata, merupakan bagi upaya menekan angka penyebaran wabah virus korona (Covid 19).

“Penekatan terhadap pemudik dan wisatawan ini kami tekankan kepada kendaraan bermotor yang plat nomornya bukan F. Selain 8 titik perbatasan, kami juga melakukan penekatan di Stasiun Bojonggede, Stasiun Cilebut, Stasiun Tenjo, Stasiun Parungpanjang, Stasiun Cibinong dan Stasiun Nambo,” terangnya.

Ade menjelaskan tugas penekatan pemudik dan wisatawan ini tidak hanya tugas Satpol PP, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, PMI dan Pramuka.

“Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Satgas Penanganan Covid 19-nya juga kami tugaskan dalam penekatan pemudik dan wisatawan, terutama di jalur-jalur tikus menuju Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan DKI Jakarta,” jelas Ade.

Kapolres Bogor, AKBP Harun melanjutkan dalam upaya penekatan pemudik dan wisatawan, jajarannya memfokuskan kendaraan pribadi luar Bogor, bus dan truk angkutan barang.

“Jangkalan bus dan kendaraan pribadi, truk angkutan barang juga kami periksa karena bisa saja menjadi modus para pemudik yang nekad pulang ke kampung halaman,” lanjut AKBP Harun. ● **gio**



IDN/ANTARA

LONJAKAN PEMUDIK DI TERMINAL CICAHEUM

Calon penumpang memindahkan barang bawaannya ke bagasi bus di Terminal Cicaheum, Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/5). Pada H-1 pelarangan mudik oleh pemerintah, penumpang di Terminal Cicaheum meningkat hingga 50 persen atau mencapai 1.200 orang per hari dibandingkan hari biasa sebelum bulan suci Ramadan.

Stasiun Pondok Rajeg akan Diaktifkan Kembali

DEPOK (IM)-Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Jawa Barat, Dadang Wihana, mengatakan Stasiun Pondok Rajeg akan diaktifkan kembali. Pengaktifan kembali ini agar masyarakat sekitar bisa memanfaatkan stasiun tersebut untuk menggunakan kereta rel listrik (KRL).

“Usulan reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg merupakan salah satu aspirasi dari Kota Depok dan menjadi salah satu topik yang dibahas mengenai reaktivasi Stasiun Kereta Api Pondok Rajeg oleh Kementerian Perhubungan dan Pengelola Transportasi Jabotabek (BPTJ),” kata Dadang Wihana di Depok, Rabu (5/5).

Dadang mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan (Kemhub) dan Badan Pengelola Transportasi Jabotabek (BPTJ) di Hotel Aston Jakarta untuk membahas Feasibility Studi (FS) reaktivasi stasiun kereta api. “Aspirasi Kota Depok direspons baik oleh Kemhub. Dengan harapan di tahun 2022 stasiun tersebut bisa kembali beroperasi,” ujarnya.

Dikatakannya, dengan diaktifkannya Stasiun Pondok Rajeg

diharapkan dapat mengubah pola pergerakan orang. Yang awalnya terpusat di Margonda menjadi terurai. “Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengusulkan itu agar layanan transportasi publik semakin nyaman. Saat ini kondisi stasiun itu hanya dilewati saja oleh kereta dari Stasiun Citayam ke Stasiun Nambo,” ujarnya.

Sejumlah warga Depok yang berdomisili di Kalimulya dan Pondok Rajeg menyambut baik kembalinya aktivitas Stasiun Pondok Rajeg. “Ini sangat baik sekali kalau Stasiun Pondok Rajeg aktif maka ada alternatif untuk naik dan turun menggunakan KRL. Jadi lebih dekat dari rumah,” kata salah seorang warga Kalimulya, Ani.

Ia mengatakan selama ini naik dan turun KRL harus melalui Stasiun Depok yang letaknya lebih jauh, belum lagi dalam perjalanan menuju Stasiun Depok yang macet. “Kalau jalan menuju Stasiun Pondok Rajeg tidak pernah macet jadi lebih nyaman saja,” katanya.

Ani berharap aktivitas Stasiun Pondok Rajeg segera terwujud sehingga warga sekitar bisa mempunyai alternatif dalam menggunakan transportasi umum. ● **pra**

Pemkot Salatiga Larang Perdagangan Daging Anjing

SALATIGA (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga, Jawa Tengah resmi melarang peredaran dan perdagangan daging anjing. Aturan ini termuat dalam Surat Edaran Nomor 510/345/414-Tentang Larangan Peredaran/Perdagangan Daging Anjing. Menurut Pemkot Salatiga, daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan. Hal ini merujuk pada Perundang-undangan yang berlaku.

Pelarangan ini juga dilakukan guna menjaga ketenteraman batin masyarakat untuk mendapatkan pangan asal hewan yang aman dan sehat. “Pemerintah Kota Salatiga menetapkan kebijakan pengawasan dan pelarangan perdagangan/peredaran daging anjing yang berpotensi menyebarkan penyakit zoonotik dan terkait dengan aspek kesejahteraan hewan,” sebagaimana

na dikutip dari Surat Edaran yang ditandatangani Wali Kota Salatiga, Yuliyanto, Rabu (5/5).

Sebagai pelaksanaannya, Pemkot Salatiga melarang kegiatan usaha atau perdagangan daging anjing secara komersial.

Pemerintah setempat juga tidak menerbitkan sertifikat veteriner khusus untuk daging anjing apabila diketahui akan dikonsumsi. Veteriner merupakan surat keterangan schat produk hewan.

Selain itu, lalu lintas perdagangan anjing juga akan diperketat. Pemerintah setempat juga tidak akan menerbitkan surat rekomendasi pemasukan daging anjing konsumsi. “Pemerintah Kota Salatiga tidak menerbitkan Surat Rekomendasi Pemasukan Daging Anjing Konsumsi,” kata Yuliyanto dalam Surat Edaran bertanggal 26 April itu. ● **pra**